



Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia

Haikal Fadhil Anam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

haikalfadhilanam@gmail.com

ABSTRACT

The political identity of Islam emerged in a very large wave after the mobilization of time at the Jakarta elections in 2016. This has many implications for various aspects of State life, including the current democracy in Indonesia. In this case, Indonesia is a country that is still in the learning phase of democracy. The political influence of Islamic identity on democracy will make the nation split. This is backed by the strong narrative of the Political Islamic Group which at the end of the goal, wanted to establish the Islamic State. The future is political, will further heed and mobilize Muslims, as a majority, and rule out other religions.

Keyword: Islam, Democracy, Political Identity, Indonesia

Pendahuluan

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia diwarnai oleh gelombang politik identitas yang begitu besar. Identitas menjadi sorotan besar dalam panggung politik di Indonesia. Identitas yang banyak digunakan dalam pertarungan politik adalah identitas Islam. Tidak heran memang jika identitas Islam banyak digunakan, karena suara mayoritas pemilih di Indonesia pemeluk agama Islam. Gelombang besar politik identitas Islam ini muncul berawal dari demonstrasi umat Islam terhadap salah satu calon gubernur Jakarta pada tahun 2016 tentang masalah penistaan agama. Adanya opini publik yang besar tentang keharusan muslim memilih pemimpin muslim menjadi kegaduhan dan pro-kontra di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat pun kemudian terpolarisasi, antara pendukung “penista agama” dan yang tidak.

Banyak kalangan menilai bahwa Indonesia sedang mengalami suatu potensi konflik yang sebenarnya sudah lama diperdebatkan, yaitu relasi antara agama dan negara. Dapat ditelusuri misalnya, relasi antara agama dan negara pernah diperdebatkan oleh Soekarno dan Muhammad Natsir. Keduanya pada saat itu berdebat tentang negara Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk sebagai kiblat Soekarno dan dianggap salah oleh Muhammad Natsir karena telah memisahkan agama dan Negara (Sari, 2016, p. 146).

Fernandes mengatakan bahwa efek dari politik identitas pada pilkada Jakarta tahun 2016 lebih mempengaruhi elite politik daripada pemilihnya. Sebagai contoh, keputusan dipilihnya

K.H Ma'ruf Amin dan pembatalan Mahfud MD merupakan strategi untuk menggaet suara pemilih muslim. Demikian pula dengan lawannya, Prabowo yang juga mengakomodir kepentingan para elit politik muslim dengan bergabung dalam beberapa kali ijtima ulama (Fernandes, n.d., p. 6).

Jika melihat peristiwa tersebut, politik identitas memang diminati oleh elite politik di Indonesia, terlebih agama, "alat" jitu untuk meraup suara pemilih. Kopko menyebutkan bahwa agama memang memiliki efek terhadap keikutsertaan politik. Ia memberikan contoh dengan ajaran Gereja Mennonite. Gereja melarang aktivitas politik, karena bersifat keduniawian, dan hasilnya pun berefek pada rendahnya pemilih politik Gereja rendah (Saputro, 2018, p. 116). Jika terus-menerus politik identitas digunakan oleh para elite politik, maka bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap demokrasi di Indonesia, terlebih Indonesia masih dalam proses belajar berdemokrasi. Dari sana kemudian, penulis ingin lebih dalam menelusuri dan menemukan, bagaimana pengaruhnya politik identitas Islam terhadap demokrasi, dan bagaimana solusinya. Dengan metode deskriptif-analitis, penulis paparkan makalah ini.

Politik Identitas dan Demokrasi: Kerangka Teoritis

Politik identitas terdiri dari dua kata, yaitu politik dan identitas. Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau negara atau pemerintah. Identitas menurut Hogg adalah konsep seseorang tentang bagaimana mereka, macam jenis mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan yang lain (Fearon, n.d., p. 4). Secara singkat, bahwa politik identitas adalah haluan politik dengan identitas tertentu. Dalam karya Buya Syafi'i Maarif yang berjudul *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Maarif, n.d., p. 4), ia berpendapat, bahwa L.A Kauffman merupakan seseorang yang pertama kali menjelaskan tentang hakikat politik identitas. Kaufman melacaknya asal mulanya dengan melihat gerakan mahasiswa anti kekerasan, SNCC (*the Student Nonviolent Coordinating Committee*), organisasi hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.

Dalam *Washington University Journal of Law and Policy* yang berjudul *Identity and Political Theory* Clarissa Rile Hayward berpendapat bahwa politik identitas adalah politik di mana seseorang ikut serta terlibat dalam mobilisasi yang sama berdasarkan pengalaman, masalah politik, dan tujuan mereka dalam kebaikan kelompok mereka menurut mereka. Menurut *Combahee River Collective*, kelompok feminis kulit hitam, politik identitas adalah politik yang secara konseptual berbeda, yaitu politik liberal yang diselenggarakan atas dasar kepentingan individu atau preferensi (Hayward & Watson, n.d., p. 9).

Sedangkan politik identitas dalam pandangan Lukmantoro adalah mengendepankan suatu kepentingan tertentu dari anggota atau kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan identitas, karakteristik, baik itu disandarkan pada kesamaan ras, etnisitas, gender atau agama. Politik identitas juga merupakan usaha politis untuk menyalurkan aspirasi dan mempengaruhi kebijakan publik yang mana dipandang berharga. Dalam konteks politik identitas agama, ada upaya untuk memasukan nilai-nilai agama dalam suatu kebijakan.

Menurut Agnes Heller, politik identitas merupakan suatu gerakan politik yang mana fokusnya pada perbedaan sebagai kategori politik utama. Cressida berpendapat bahwa politik identitas adalah nama lain dari biopolitik. Ia berbicara tentang suatu kelompok yang diidentikan atas suatu karakteristik biologis atau tujuan biologisnya dari suatu titik pandang (Nasrudin & Nurdin, 2018, pp. 36–37). Menurut Meister, politik identitas mewakili peran dan kesadaran

afiliasi politik. Maksudnya adalah, ada peran penting dari kesadaran dalam mengembangkan identitas politik untuk memutuskan bergabung dengan kelompok politik tertentu (Sajjad, Malghnai, & Khosa, 2017, p. 203). Menurut hemat penulis dari semua beberapa pendapat di atas, yang paling komprehensif pendapatnya adalah pendapat dari Lukmantoro. Politik identitas adalah politik yang mengedepankan kepentingan anggota atau kelompok yang memiliki kesamaan identitas, karakteristik, baik itu disandarkan pada kesamaan ras, etnisitas, gender atau agama.

Demokrasi berasal dari kata “*demos*” dari bahasa Yunani yang berarti masyarakat, dan “*kratio*” atau “*krato*” bahasa Yunan yang berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologi berarti pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Demokrasi pada awalnya pertama kali digunakan oleh Chleisthenes. Selanjutnya, sebelum Yunani menerapkan sistem demokrasi, bangsa Sumeria pun telah menerapkannya, bahkan bangsa India pun konon telah menerapkan prinsip-prinsipnya (Hakiki, 2016, p. 2). Setelah perang Dunia ke II, demokrasi muncul sebagai sebuah sistem politik di mana para pemimpin dunia banyak menerimanya. Gagasan ini muncul setelah gagalnya Fasisme dan Naziisme. Awal tahun 1950-an, UNESCO mengorganisasi lebih dari seratus orang dari Barat dan Timur untuk mengobservasi dan mengkaji demokrasi. Hasilnya menunjukkan respon yang positif terhadap demokrasi. Untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dianggap sebuah sistem yang paling ideal (Zuhro, 2009, p. 13).

Dalam buku *Fiqh Demokrasi* yang ia mengutip dari Munir Fuady dalam bukunya “Konsep Negara Demokrasi” menjelaskan beberapa definisi demokrasi oleh beberapa para ahli sebagai berikut: a) Joseph Shemeter berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai suatu putusan politik di mana para individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan perjuangan kompetitif atas suara rakyat. b) Sidney hook berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana putusan-putusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. c) Henry B. Mayo berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu sistem di mana kebijakan untuk ditentukan atas dasar mayoritas wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan publik (Samuddin, 2013, pp. 164–165).

Dalam masyarakat Islam, sebagian ulama menolak demokrasi dan sebagian yang lain menerima dengan syarat dan sebagian lain menerima secara mutlak. Dalam hal ini yang menolak demokrasi beralasan bahwa itu bukan sistem Islam. Salah satunya adalah Maududi, ia mengatakan bahwa setiap konsepsi Islam mengenai demokrasi merupakan antitesis dari demokrasi barat sekuler yang mentransfer dari kedaulatan Tuhan menuju kedaulatan rakyat. Lain hal dengan Syaikh Al-Azhar, Ahmad Tayyib yang mendukung demokrasi karena melindungi martabat semua pihak (Saeed, 2015, p. 257).

Dalam konteks Indonesia pun demikian, ada yang menolak dan ada yang menerima. Salah satu yang menerima secara mutlak adalah Abdurrahman Wahid. Sedang Jalaludin Rahmat memandang demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang mendukung hak asasi manusia, persamaan di mata hukum, hak kebebasan berbicara dan lainnya. Namun demikian, ia tetap memandang bahwa sistem demokrasi adalah sistem sekuler yang kedudukan di tangan rakyat, sedang Islam di tangan Tuhan (Surur, 2018, pp. 16–17). Sedang menurut Nurcholis Majid,

intisari demokrasi adalah proses dinamis ke arah suatu perbaikan, sehingga tidak perlu didefinisikan secara kaku dan final (M, 2011, p. 19).

Jika ditarik kesimpulan dari berbagai teori yang ada, bahwa demokrasi pada intinya adalah suatu sistem yang kedaulatannya berada di tangan rakyat, yang menampilkan keadilan, kebebasan dan kemanusiaan. Demokrasi mengedepankan aspek persamaan hukum. Segala putusan-putusan penting merupakan juga hak rakyat untuk ikut serta melalui sistem yang ada.

Genealogi Demokrasi dan Politik Islam di Indonesia

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Parmudi (Parmudi, 2014, pp. 115–125), Indonesia telah mengadopsi dan menjalankan beberapa macam model demokrasi. Dalam sejarahnya, Indonesia pertama kali menjalankan demokrasi liberal/parlementer. Pada saat itu Indonesia mengalami ketidakstabilan politik dan pemerintahan disebabkan karena seringnya pergantian pelaksana tugas pemerintah. Hal tersebut terjadi karena dalam sistem demokrasi pemerintah parlementer kedudukan Negara dibawah DPR dan itu sangat tergantung pada dukungan dari DPR dan tentu dalam hal ini akan menimbulkan banyak perbedaan tergantung pada afiliasi politiknya masing-masing.

Era demokrasi liberal diwarnai atau ditandai dengan dikeluarkannya maklumat pemerintah No. X pada 16 Oktober 1945 yang kemudian dikenal sebagai maklumat X Bung Hatta karena ditandatangani oleh Hatta. Maklumat tersebut berisi tentang perubahan sistem Indonesia dari presidensial ke parlementer. Dengan sistem ini, ganti-ganti kabinet di dalam pemerintahan banyak terjadi. Sering terjadinya ketidakpercayaan di tengah jalan akhirnya jatuh. Namun demikian, dengan sistem ini, banyak partai yang ikut serta dalam pemilu. Dalam sistem ini pula, umat Islam dapat memperjuangkan aspirasi mereka yang sebelumnya gagal karena konsesus politik pada 1945. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955. Pada saat itu ada 39 partai politik yang ikut dalam kontestasi pemilu. Pemilu pada tahun tersebut dianggap pemilu yang paling demokratis. Dari pemilu ini setidaknya ada tiga ideologi yang memenangkannya, Islam, Nasionalis, dan Komunis.

Kalangan Islam yang memenangkan diantaranya adalah Masyumi dengan perolehan 7.789.619 suara, NU 6.989.333 suara, PSII dengan 1.059.922 suara, PERTI 465.359 suara dan PPTI 74.913 suara. Kalangan nasionalis yang memenangkan diantaranya adalah PNI dengan perolehan suara 9.070.218 suara dan PKI memperoleh 6.232.512 suara. Paling tidak saat itu ada empat partai yang berkuasa, PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pada waktu itu pertarungan ideology pun terjadi, ada yang membela Pancasila dan ada yang ingin berideologi Islam. Natsir salah satu yang keras terhadap Pancasila, karena Pancasila digunakan oleh versi tafsir mereka. Ia mengatakan bahwa Pancasila sangat bisa ditafsirkan oleh sesuai selera. Dalam perdebatan tersebut kedua belah pihak tidak sampai pada kesepakatan, dan oleh karena itu Soekarno mengeluarkan dekrit menegaskan kembalinya pada UUD 1945. Dengan keluarnya dekrit ini, umat Islam kembali gagal untuk memformalisasi Islam ke dalam sistem Negara.

Selanjutnya, Indonesia menjalankan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin lahir atas kesadaran dan keyakinan atas apa yang terjadi pada demokrasi parlementer yang buruk. Demokrasi parlementer hanya membuat perpecahan dan tentunya harus diganti. Ir. Soekarno memaparkan tentang pokok-pokok kehidupan demokrasi terpimpin antara lain: 1) Demokrasi terpimpin bukan dictator, 2) Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang sesuai dan cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia, 3) Inti daripada demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pada 5 Juli 1959 Soekarno

mengeluarkan dekrit presiden yang menetapkan pembubaran Konstituante dan kembali ke UUD 1945. Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Pada era ini, partai Masyumi dipaksa untuk membubarkan diri karena dianggap sebagai oposisi yang kritis, berbahaya dan dianggap juga akan melakukan revolusi. Selain itu, Soekarno juga menuduh Masyumi sebagai pengendali pemberontak yang terjadi di daerah-daerah seperti Sumatra Barat, Aceh, Sulawesi, dan Kalimantan. Di pihak lain, partai NU, PSII, dan PPTI lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan demokrasi versi Soekarno tersebut. Mereka mengambil sikap akomodatif dan berdampingan bersama pemerintah Soekarno. Dalam era ini NU terlihat menikmati percaturan politik di dalamnya dan berusaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pemerintahan.

Pada gilirannya, muncullah demokrasi pancasila pada saat orde baru. Latar belakang munculnya demokrasi pancasila karena banyaknya penyelewengan dan permasalahan yang dialami pada saat itu. Selain itu juga dikarenakan ketidakcocokannya kedua demokrasi yang telah berlangsung. Demokrasi pancasila berdasarkan pada pola pikir dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Dalam konsep demokrasi pancasila dijelaskan bahwa menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai harkat martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pada era orde baru ini, para tokoh Islam khususnya Masyumi mencium harapan untuk bisa kembali memperjuangkan Islam masuk ke dalam sistem pemerintah, namun demikian mereka justru kecewa karena Orba tidak memberi fasilitas untuk kembali terbentuknya Masyumi. Tidak hanya itu, justru kebanyakan dari pendukung Orba mengalami trauma atas Islam politik. Mereka menganggap bahwa keberadaan Islam politik akan mengganggu stabilitas politik pemerintah Orba. Pemerintahan Orba bersikap antagonis dan akomodatif terhadap Islam. Fase akomodatif ditandai dengan banyaknya tokoh-tokoh Islam masuk dalam jabatan di pemerintahan. Namun lama-kelamaan pemerintah Orba dinilai bersifat otoriter karena banyaknya pemaksaan dan lain sebagainya. Pada akhirnya pemerintah Orba dilengserkan oleh gerakan mahasiswa dan juga rakyat Indonesia. Pada saat itu yang sangat lantang dari gerakan mahasiswa adalah HMI.

Pada era reformasi, demokrasi yang dijalankan tetap demokrasi Pancasila. Namun dalam beberapa hal ada yang berbeda seperti dalam pelaksanaannya sebagai berikut: 1) Pemilihan umum lebih demokratis, 2) Partai politik lebih mandiri, 3) Adanya pengaturan hak asasi manusia, 4) Lembaga demokrasi lebih berfungsi, 5) Konsep trias politika bersifat otonom penuh. Demokrasi berjalan dan pancasila sebagai ideologi Negara terus dikuatkan. Namun demikian, tetap saja akan selalu ada ideologi-ideologi yang bermunculan dan bahkan diperjuangkan untuk mengganti pancasila. Beberapa tahun belakangan ini pun banyak menyeruak politik identitas yang begitu besar. Tentunya ini tidak bisa lepas dari sejarah yang telah dijelaskan di atas, bagaimana kemudian Islam politik ingin menerapkan ideologinya di dalam Negara.

Pengaruh Politik Identitas Islam Terhadap Demokrasi di Indonesia

Politik identitas Islam muncul dalam gelombang yang sangat besar setelah mobilisasi masa pada pilkada Jakarta pada tahun 2016. Hal ini memiliki berbagai implikasi pada berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk juga terhadap demokrasi di Indonesia saat ini. Sedangkan

Indonesia merupakan negara yang masih dalam tahap pembelajaran mengenai demokrasi. Dalam demokrasi politik identitas memang diperbolehkan, tetapi ketika politik identitas itu dilakukan berlebihan maka akan memiliki pengaruh-pengaruh yang tidak baik, terlebih di Indonesia yang mana masyarakatnya beragam, baik dari ras, suku, dan agama. Dalam hal ini, politik identitas yang muncul adalah politik identitas Islam.

Untuk melihat latar belakang mengapa kemudian muncul politik identitas Islam yang kuat, paling tidak bisa dilihat dalam peta kelompok pemikir Islam oleh Abdullah Saeed. Menurutnya, ada enam kelompok pemikir muslim era modern dengan perbedaan esitemologinya, yaitu:

(1) *The Legalist-tradisionalist* (Hukum-tradisional), kelompok ini menitik beratkan pada hukum-hukum fiqh yang ditafsirkan dan dikembangkan oleh ulama pra modern. (2) *The Theological Puritans* (Teologi Islam Puritan), kelompok ini menitikberatkan pada dimensi etika dan doktrin Islam. (3) *The Political Islamist* (Politik Islam), kelompok ini menitikberatkan pada aspek politik Islam yang pada akhirnya ingin mendirikan negara Islam. (4) *The Islamist Extremist* (Islam garis Keras), kelompok ini memiliki kecenderungan untuk berbuat kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya lawan. (5) *The Secular Muslims* (Muslim Sekuler), kelompok ini memiliki pemikiran bahwa agama bersifat privat. (6) *The Progressive Ijtihadis* (Muslim Progressif-ijtihadi), kelompok ini adalah para pemikir Islam kontemporer yang memiliki wawasan klasik Islam yang cukup, yang berusaha menafsirkan ulang agama melalui perangkat metodologi ilmu-ilmu modern agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat modern (Saeed, 2006, pp. 142–150).

Dalam hal ini, politik identitas Islam mewakili dari kelompok *The Political Islamist* (Politik Islam). Sebagaimana dalam sejarahnya, Islam politik telah beberapa kali ingin mewujudkan negara Islam. Sebagaimana dapat dilihat dari pertentangan antara Soekarno dengan partai Masyumi. Di periode Soeharto pun demikian, lahirnya Islam politik yang ingin mendirikan negara Islam. Kelompok *Political Islamist* ini berorientasi pada pelaksanaan syariat secara resmi. Eklusivisme demikian nantinya akan membuat perpecahan bangsa karena dominasi dari politik identitas Islam yang sangat kuat sehingga mengesampingkan atau menomerduakan agama yang lain. Sebagaimana dalam teori demokrasi pancasila di atas, bahwa demokrasi harus berlandaskan pada nilai-nilai persatuan bangsa. Selain itu, dalam proses pemilihan presiden, syarat yang secara objektif dan sanggup sebagai pemimpin menjadi acuan utama, tetapi bukan dilihat dari identitasnya. Hal ini tentu mencederai demokrasi.

Untuk mengatasi gerakan politik identitas Islam yang begitu kuat ini, menurut hemat penulis adalah dengan mengkampanyekan ajaran-ajaran dari kelompok *The Progressive Ijtihadis*. Ketika narasi dibangun sedemikian rupa oleh kelompok *Political Islamist* untuk memobilisasi massa, maka tidak ada cara lain selain melawannya dengan narasi juga. Kelompok ini berbeda dengan kelompok *Political Islamist*. *The Progressive Ijtihadis* dalam orientasi politiknya lebih menekan pada praktik penafsiran syariat pada asas keadilan dan kebaikan bersama (Asyari, 2017, p. 211).

Simpulan

Politik identitas Islam turut mewarnai dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Sudah beberapa kali ditampilkan di panggung politik Indonesia pada saat pilkada maupun Pemilu. Namun demikian, pengaruhnya terhadap demokrasi, atas eksklusivisme politik identitas Islam tersebut akan membuat perpecahan bangsa. Kedepannya politik, akan lebih mengindahkan dan

memobilisasi umat Islam, sebagai mayoritas, dan mengesampingkan agama yang lain. Tentu ini akan sangat mencederai demokrasi pancasila yang selama ini dipegang dengan nilainya keadilan sosial dan persatuan bangsa. Untuk itu, perlunya perlawanan narasi dari narasi politik yang sudah berkembang. Dalam hal ini, adalah mengkampanyekan narasi dari kelompok Islam yang dianggap lebih inklusif. Tantangan besar akan dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk itu segenap warga Negara Indonesia wajib waspada terhadap berkembangnya politik identitas.

Daftar Pustaka

- Asyari, A. (2017). Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2).
- Fearon, J. D. (n.d.). *What Is Identity (as We Now Use the Word)?* 45.
- Fernandes, A. (n.d.). *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas*. 11.
- Hakiki, K. M. (2016). Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim dan Penerapannya di Indonesia. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i1.583>
- Hayward, C. R., & Watson, R. (n.d.). *Identity and Political Theory*. 33, 34.
- M, H. N. (2011). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Jurnal Sulesana*, 6(2).
- Maarif, A. S. (n.d.). *Politik Identitas*. 144.
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2018). Politik Identitas dan Representasi Politik: Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022. *Hanafiyah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 8(2), 36.
- Parmudi, M. (2014). *Islam dan Demokrasi di Indonesia (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Saeed, A. (2006). *Islamic thought: An introduction*. London ; New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Saeed, A. (2015). *Reading the Quran in the Twenty-First century: A Contextualist Approach*. Bandung: Mizan.
- Sajjad, F., Malghnai, M., & Khosa, D. (2017). Language, Social Media and Political Identity (Re)presentation: A New Theoretical Framework for the Analysis of Social Media Political Discourse. *International Journal of English Linguistics*, 8(2), 199. <https://doi.org/10.5539/ijel.v8n2p199>
- Samuddin, R. (2013). *Fiqh Dmokrasi: Menguak kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Prees.
- Saputro, A. (2018). Agama Dan Negara: Politik Identitas Menuju Pilpres 2019. *ASKETIK*, 2(2). <https://doi.org/10.30762/ask.v2i2.912>
- Sari, E. (2016). *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*. 2, 12.
- Surur, M. Z. (2018). *Demokrasi dalam Surat Ali Imran Ayat 159 Perspektif Abdullah Saeed*. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Zuhro, R. S. (2009). *Demokrasi lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*. Yogyakarta: Ombak.